

© 2005 Sekolah Pasca Sarjana IPB
 Makalah Kelompok 1, Materi Diskusi Kelas
 Pengantar Falsafah Sains (PPS702)
 Program Pasca Sarjana / S3
 Institut Pertanian Bogor
 Sem 2 2004/5

Posted 21 March 2005

Dosen:
 Prof. Dr. Ir. Rudy C. Tarumingkeng (penanggung jawab)
 Prof. Dr. Ir. Zahrial Coto
 Dr Hardjanto

ANALISIS DAMPAK PENGENAAN KEMBALI TARIF IMPOR KEDELAI BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Oleh: Kelompok I

**Darsono, Haryadi, Jan Horas V. Purba, Kusmayadi, Rony Dwi Susanto,
 Rustam Abdul Rauf**

ABSTRAK

Ditengah semangat perdagangan bebas dunia, kebijakan penghapusan tarif impor komoditi tentu tidak populer. Namun, dalam nuansa pasar yang tidak adil (unfair market) upaya melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat bisalah dimengerti. Setelah Indonesia menghapuskan terif impor kedelai sejak tahun 1998, volume impor kedelai meningkat 500% sampai tahun 2004 yang tentu membebani cadangan devisa dan merugikan produsen kedelai domestik. Mulai Pebruari 2005 pemerintah memberlakukan kembali tariff impor kedelai dengan skenario antara 10% hingga 15%.

Studi ini bertujuan; melakukan analisis kritis atas langkah baru pemerintah dalam pengenaan kembali tarif impor kedelai dengan menganalisis dampak kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan petani sebagai produsen, kesejahteraan konsumen, penerimaan pemerintah, dan efek kesejahteraan masyarakat secara umum.

Hasil studi; dengan acuan nilai tukar rasional Rp9 000/US\$ dan kebijakan pengenaan tarif layak sebesar 10% (citeris paribus) berdampak pada perbaikan surplus produsen, penerimaan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat lebih besar dibandingkan dengan penurunan surplus konsumen. Peningkatan besar tariff sampai dengan 27% masih disarankan, khususnya jika rupiah terdepresiasi sampai Rp9 500/US\$. Namun demikian tetap memperhatikan resiko penurunan keuntungan normal dari petani kedelai dan trade off lahan kedelai untuk pengembangan tanaman pangan lainnya.

Kata kunci: Tarif impor, Kedelai, Kesejahteraan.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Permasalahan

Kebutuhan kedelai terus meningkat karena pertambahan penduduk, juga meningkatnya konsumsi per kapita terutama dalam bentuk olahan dan tumbuhnya industri pakan ternak (Siregar, 2003). Permintaan kedelai per kapita sejak periode 1970 sampai 1990 telah meningkat 160%. Sedangkan pada periode 1990-an sampai tahun 2010 diperkirakan tumbuh 2,92% per tahun (Siregar, 1999). Peningkatan konsumsi kedelai yang begitu pesat dan tidak dapat diimbangi oleh peningkatan produksi kedelai dalam negeri, maka terjadi kesenjangan. Kesenjangan itu ditutup dengan kedelai impor yang banyak menyita devisa (Amang dan Sawit, 1996). Sejak perdagangan kedelai lepas dari kontrol BULOG mulai tahun 1991 impor kedelai meningkat sangat pesat (Swastika, *et al.*, 2000). Upaya maningkatkan produksi berbasis lahan (intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi) melalui program OPSUS (1980-an), GEMA PALAGUNG (1997) belum mampu meningkatkan produksi secara signifikan meskipun banyak studi menemukan bahwa kedelai Indonesia pada tingkat pengusahaan yang ada mempunyai daya saing (komparatif maupun kompetitif) (Hayami *et al.*, 1987; Rosegrant, 1987; Purwoto dan Suyaka, 1992; Amang dan sawit, 1996; Purwoto *et al.*, 1997). Namun indikasinya menurun drastis setelah tahun 1998 hingga sekarang (Siregar, 1999; Sudaryanto *et al.*, 2001; Siregar dan Sumaryanto, 2003; Siregar, 2003; Hendayana. R., 2003). Pada bulan agustus 2004 telah dicanangkan gebrakan baru dengan PROGRAM BANGKIT KEDELAI yang diharapkan akan mampu mewujudkan kecukupan pemenuhan kedelai dalam negeri dengan menaikkan produksi dari 1.1 juta sekarang menjadi 2.5 juta ton pada tahun 2007 (Hafsyah. J., 2004).

Kebijakan perdagangan kedelai, pada tahun 1974 pemerintah telah menerapkan *tariff ad-valorem* untuk kedelai impor, 30%, namun sejak tahun 1998 tarif impor kedelai ditiadakan. Dampaknya, tahun 1999 volume impor mencapai kenaikan sampai 500% (Swastika, *et al.*, 2000), bahkan tahun 2004 total kebutuhan kedelai nasional, 65% dipenuhi dari impor (Bisnis Indonesia, 2004). Hal ini membuat setiap orang terkesima.

Indonesia sebenarnya telah mengikatkan diri dalam AFTA untuk menerapkan tarif impor kedelai sebesar 27%, lebih kecil dari *tariff* dasar WTO 30%, efektif mulai tahun 2004 (Rachman *et al.*, 1996). Sampai tahun 2010 Indonesia diberi kesempatan untuk mengenakan tarif sampai 5%. Namun hal itu tidak dilaksanakan. Baru pada akhir tahun 2004 pemerintah membuat kebijakan untuk menerapkan kembali tarif impor kedelai sebesar 10% dari kisaran bargaining 10% sampai 15% (Sinar Tani, 2004), yang akan mulai efektif pada bulan Pebruari 2005 (Bisnis Indonesai, 2005). Menurut Hafsyah, J., (2004) pentarifan impor 27% akan dikenakan pada tahun 2007. Berarti akan mendahului masa tenggang AFTA sampai 2010.

Dari langkah kebijakan baru pengenaan tarif impor kedelai 10% yang segera akan diterapkan bulan Pebruari 2005 akan membawa dampak baik kepada konsumen, produsen, pemerintah, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Berkenaan dengan hal tersebut, permasalahan dalam studi ini diformulasikan; bagaimana dampak kebijakan pengenaan kembali tarif impor kedelai terhadap kesejahteraan petani sebagai produsen, kesejahteraan konsumen, penerimaan pemerintah dan efek kesejahteraan masyarakat, berdasarkan berbagai skenario besaran tarif impor.

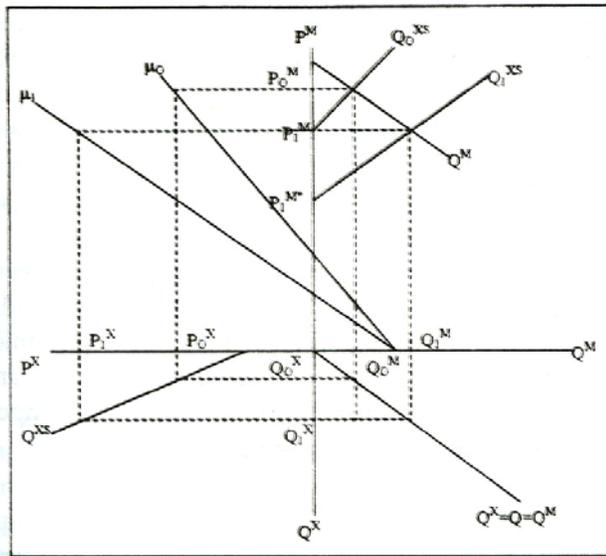
1.2. Tujuan Studi

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis kritis atas langkah baru pemerintah dalam pengenaan kembali tarif impor kedelai dengan menganalisis dampak kebijaksanaan tersebut terhadap kesejahteraan petani sebagai produsen, kesejahteraan konsumen, penerimaan pemerintah, dan efek kesejahteraan masyarakat secara umum.

II. KERANGKA TEORI

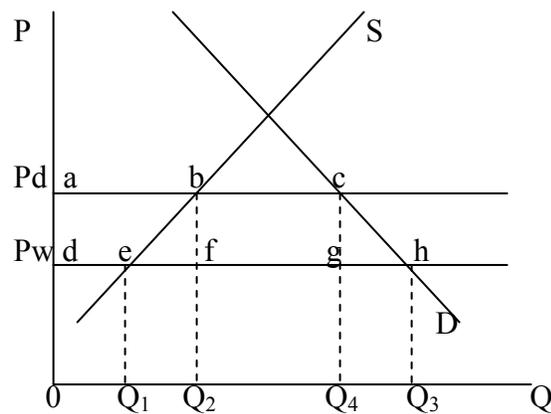
2.1. Perdagangan Internasional dan Tarififikasi

Dalam perdagangan internasional, pemerintah menerapkan kebijaksanaan ekspor maupun impor terhadap komoditi yang diperdagangkan. Kebijaksanaan itu meliputi, pajak ekspor (TAK), tarif impor, dan nilai tukar (*exchange rate* - ER). Gonarsyah (1983) dalam Darsono (2004) menjelaskan fenomena tersebut seperti terlihat pada Gambar 1. Asumsinya adalah: (1) pasar bagi jasa perkapalan/pelayaran bersaing secara sempurna, dan (2) pasar impor bagi produk yang diperdagangkan relatif kecil terhadap total sektor perdagangan, sehingga nilai tukar tidak dipengaruhi oleh pengembangan pasar. Pada Gambar (1) ditunjukkan bagaimana perubahan nilai tukar dari μ_0 ke μ_1 (disebabkan oleh devaluasi mata uang di negara pengekspor), akan menyebabkan bergesernya kurva penawaran lebih (*excess supply*) produk negara pengekspor di negara pengimpor dari Q_{0xs} ke Q_{1xs} . Hal ini menyebabkan harga produk ekspor di negara pengimpor lebih murah dari pada sebelumnya. Akhirnya, keseimbangan harga dan volume perdagangan di negara pengimpor akan berubah dari P_{0M} , Q_{0M} ke P_{1M} , Q_{1M} , dan di negara pengekspor akan berubah dari P_{0x} , Q_{0x} ke P_{1x} , Q_{1x} .



Gambar 1. Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Terhadap Harga dan Jumlah Komoditi Ekspor dan Impor.

Sumber : Gonarsyah dalam Darsono (2004) p 27.



Gambar 2. Kebijakan Pembatasan Impor Dengan Tarif Impor

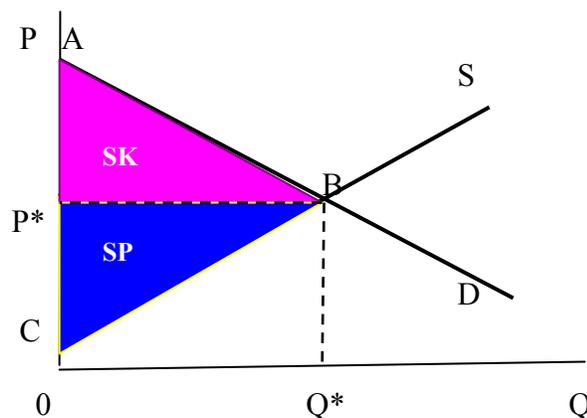
Sumber: Rachman A., *et al.*, (1993) p 141.

Kebijakan pembatasan impor seperti ditunjukkan Gambar 2 dapat dilakukan dengan tarif impor, yang menetapkan harga dalam negeri (P_d) lebih tinggi daripada harga internasional (P_w). Dengan demikian, akan menaikkan produksi dari OQ_1 menjadi OQ_2 dan menurunkan konsumsi dari OQ_3 menjadi OQ_4 . Akibatnya, impor berkurang dari $(Q_3 - Q_1)$ menjadi $(Q_4 - Q_2)$. Penetapan tarif impor sebesar $(P_d - P_w)$, mengakibatkan konsumen dirugikan sebesar $achd$ yang ditransfer kepada produsen sebesar $abed$ dan anggaran pemerintah sebesar $bcgh$. Sisanya sebesar $bfgh$ dan chg , merupakan kehilangan efisiensi dalam produksi dan konsumsi (Rachman. A. *et al.*, 1993).

2.2. Ukuran Kesejahteraan

Menurut Daryanto. A. (1989) untuk mengetahui pengaruh dari berbagai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat, dapat didekati dengan konsep surplus konsumen (*consumer's surplus*) dan surplus produsen (*producer's surplus*). Apabila perubahan ekonomi yang dihasilkan dari dampak kebijakan pemerintah merupakan perubahan marginal, maka harga dan biaya marginal akan sangat akurat (tepat) mencerminkan keuntungan (*gains*) dan kerugian (*losses*). Just, Hueth dan Schmitz (1982) menyatakan bahwa perubahan harga komoditi akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan produsen dan konsumen komoditi yang bersangkutan. Pengaruh tersebut dapat diukur dari besarnya surplus produsen dan konsumen.

Surplus Konsume. Menurut konsep Marshall dalam Daryanto. A. (1989), surplus konsumen didefinisikan sebagai perbedaan antara jumlah uang yang sebenarnya dibayarkan oleh konsumen dengan jumlah uang yang bersedia dibayarkan daripada ia tidak memiliki barang tersebut. Pada Gambar 3, surplus konsumen (CS) digambarkan dengan area yang terletak di bawah kurva permintaan dan di atas garis P^*B yang menunjukkan harga keseimbangan. Dalam hal ini, surplus konsumen menunjukkan keuntungan yang diperoleh konsumen karena membeli seluruh unit yang diinginkan dengan harga berlaku P^* , meskipun mereka bersedia membayar dengan harga yang lebih tinggi. Surplus konsumen merupakan perbedaan antara jumlah uang yang bersedia dibayarkan untuk jumlah Q^* (ditunjukkan oleh trapesium $OABQ^*$) dan jumlah yang sebenarnya dibayarkan (segi empat OP^*BQ^*).



Gambar 3. Surplus Konsumen dan Surplus Produsen.
Sumber : Daryanto. A. (1989) p. 3.4.

Surplus Produsen. Surplus produsen didefinisikan, keuntungan yang diperoleh produsen karena ia menerima harga sebesar P^* untuk semua unit yang terjual meskipun mungkin bersedia menawarkan jumlah unit yang lebih sedikit dengan harga-harga yang lebih rendah. Pada Gambar 3, surplus produsen ditunjukkan oleh daerah yang terletak di atas kurva penawaran dan di bawah harga keseimbangan P^* atau area CP^*B . Surplus produsen disebut pula sebagai sewa ekonomi (*economic rent*), jika diasumsikan bahwa biaya tetap (*fixed cost*) tidak diperhitungkan (Pindyck, R.S. and Rubinfeld, D. L., (1992).

Surplus Ekonomi. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan total dalam masyarakat diperoleh dari penjumlahan antara surplus konsumen dan surplus produsen.

2.3. Kriteria Pengukuran Perubahan Kesejahteraan

Terdapat berbagai ukuran/kriteria yang digunakan dalam mengukur kesejahteraan masyarakat seperti surplus konsumen, surplus produsen, dan surplus ekonomi dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari berbagai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Kriteria tersebut adalah kriteria *Pareto*, kriteria *Kaldor-Hicks*, dan kriteria Scitovsky (Daryanto, A. 1989).

Kriteria Pareto. Kriteria Pareto menyatakan bahwa sesuatu perubahan dianggap sebagai perubahan yang membawa kebaikan, jika perubahan tersebut mengakibatkan beberapa orang menjadi lebih baik namun tak seorangpun menjadi lebih buruk. Kelemahan dari ukuran ini adalah, tidak berlaku pada kasus suatu perubahan yang menguntungkan beberapa orang, namun juga merugikan orang lain. Walaupun besarnya keuntungan adalah lebih besar jika dibandingkan dengan besar kerugian, itu berarti bukan suatu perbaikan. Dengan demikian kriteria Pareto tidak dapat menentukan mana yang lebih baik. Untuk menyatakan hal tersebut, kriteria *Kaldor-Hicks* dapat dipergunakan.

Kriteria Kaldor-Hicks. Kriteria Kaldor-Hicks menyatakan bahwa suatu perubahan merupakan suatu perbaikan jika pelaku ekonomi (agen ekonomi) yang beruntung dari adanya perubahan dapat membayar ganti rugi kepada pelaku ekonomi (agen ekonomi) yang menderita kerugian dan besarnya keuntungan yang diperoleh adalah lebih besar dari ganti rugi yang dibayarkan disebut kriteria kompensasi.

Menurut Kaldor-Hicks, perubahan ke arah perbaikan menunjukkan bahwa berbagai kombinasi utilitas antara pelaku ekonomi A dan B yang terdapat pada kurva kemungkinan utilitas dapat diperoleh dengan jalan pendistribusian kembali (redistribusi) pendapatan dalam perekonomian dengan menggunakan pajak sekaligus (*lumpsum tax*) atau subsidi. Kelemahan dari

kriteria ini adalah adanya sifat potensia kriteria yang memungkinkan adanya reversal paradox dan intransitif ranking.

Kriteria Ganda Scitovsky. Scitovsky menutupi kelemahan dari kriteria *Kaldor-Hicks* dengan mengusulkan uji ganda yang lebih ketat, yaitu: (a) gunakan kriteria *Kaldor-Hicks* untuk menentukan apakah perubahan dari keadaan awal ke keadaan baru merupakan suatu perbaikan, dan (b) gunakan kriteria *Kaldor-Hicks* untuk menentukan apakah perubahan kembali dari keadaan baru ke keadaan lama bukan merupakan perbaikan pula.

Baumol (Daryanto. A., 1989) mengkritik kedua kriteria *Kaldor-Hicks* dan Scitovsky karena mereka menggunakan nilai uang sebagai ukuran besarnya utilitas. Padahal uang mempunyai nilai yang relatif tergantung atas kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Berdasarkan konsep Baumol tersebut, maka Bergson telah memperkenalkan kriteria yang lain, yaitu fungsi kesejahteraan sosial (*social welfare function*). Penilaian tentang perubahan hanya dapat dilakukan jika masyarakat mempunyai fungsi kesejahteraan sosial yang menyatakan bagaimana kebijakan masyarakat tergantung kepada kesejahteraan tiap anggotanya.

Pemutusan implementasi kriteria akhirnya tergantung pada pertimbangan nilai (*value judgement*) untuk menyatakan bahwa secara keseluruhan masyarakat menjadi lebih baik dengan adanya perubahan. Mekanisme itu dapat ditempuh dengan kesepakatan publik (*public choice*).

III. KERAGAAN PRODUKSI DAN PERDAGANGAN KEDELAI

3.1. Produksi dan Perdagangan Kedelai Dunia

Dari survey FAO untuk 92 negara (Alexandrats. N., 1995), sebagian besar negara berkembang diketahui bahwa laju permintaan bahan makanan protein sampai tahun 2010 meningkat konsisten 3.4% per tahun. Kedelai adalah sumber protein nabati sereal menyumbang porsi sebesar 35.6%. Tabel 1. dapat dilihat bahwa pertumbuhan produksi, luas areal, dan produktivitas dunia semakin menurun dari masing-masing 11.8%; 9.4%; 9.4%; dan 2.1% pada periode 1970-90 menjadi 3.6%; 1.9%; dan 1.7% pada periode 1990-2010. Produsen utama kedelai dunia adalah AS, Brasil, Argentina, dan Meksiko.

Tabel 1. Produksi, Luas Areal, dan Produktivitas Kedelai Dunia.

Komoditi	Produksi (P)			Luas Areal (A)			Produktivitas (Y)			Pertumbuhan (%/tahun)					
	Juta Ton			Juta Hektar			Ton/ha			1970-90			1990-2010		
	1971	1990	2010	1970	1990	2010	1970	1990	2010	P	A	Y	P	A	Y
Kedelai	3	38	79	3	22	33	1.0	1.7	2.4	11.4	9.4	2.1	3.6	1.9	1.7

Sumber: Alexandratcs. N., 1995 p.169.

Sedangkan dari sisi perdagangan kedelai dunia dilaporkan bahwa total nilai ekspor dunia 13 416 juta US\$ dan import sebesar 9 776 juta US\$ dengan net balance 3 640 juta US\$. Pertumbuhan *net balance* tersebut diperkirakan akan tumbuh menjadi +50% sampai tahun 2010. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pasar dunia kedelai memiliki potensial stok yang baik sehingga ekspansi pasar, utamanya untuk negara pengimpor seperti Indonesia sangat memungkinkan.

3.2. Produksi dan Perdagangan Kedelai Indonesia

Analisis perkembangan luas areal panen, produksi dan produktivitas kedelai selama 24 tahun terakhir (1974-1998) (Sudaryanto *et. al.*, 2001) antara lain menjelaskan beberapa hal, sebagai berikut: (1) perkembangan luas areal panen kedelai menunjukkan kondisi yang kurang stabil, dimana pada periode (1979-1983) dan (1994-1998) mengalami pertumbuhan negatif masing-masing -1.72 dan -5.72% per tahun. (2) Perkembangan produksi memberi gambaran yang sama dimana periode (1974-1983) dan (1994-1998) mengalami pertumbuhan negatif masing-masing -1.78 dan -5.83% per tahun. (3) Pertumbuhan yang paling stabil terjadi pada periode (1984-1988) dimana luas areal kedelai Indonesia tumbuh sebesar 14.64% dan produksi tumbuh sebesar 20.34% per tahun. (4) Pertumbuhan produktivitas mengalami penurunan meskipun relatif kecil dan pada dua periode waktu (1979-1983) dan (1994-1998) produktivitas turun masing-masing sebesar -0.30 dan -0.05%.

Tabel 2. Impor Kedelai di Indonesia, 1995-2000.

Tahun	Kedelai Konsumsi Langsung		Bungkil Kedelai Untuk Industri			Total Impor	
	Volume (000 ton)	Nilai (000 US\$)	Volume (000 ton)	Setara Kedelai (000 ton)	Nilai (000US\$)	Volume (000 ton)	Nilai (000US\$)
1995	800	243 734	499	604	121 107	1 405	364 841
1996	607	180 590	682	827	163 722	1 434	344 312
1997	746	251 656	942	1 142	265 934	1 889	517 590
1998	616	206 674	869	1 053	281 724	1 669	488 390
1999	343	98 775	668	810	157 830	1 154	256 605
2000	570	264 327	443	537	76 883	1 107	341 210

Sumber: Sudaryanto *et. al.*, (2001)

Keterangan: 1 kg biji kedelai setara dengan 0.825 bungkil kedelai

Kedelai dikonsumsi dalam bentuk biji, olahan (tahu, tempe, taucho, kecap, dan lain-lain) dan industri. Dalam periode (1984-2000) rata-rata konsumsi perkapita desa dan kota dalam bentuk biji tumbuh 0.5%, dalam bentuk olahan tumbuh sebesar 24.5%, dan untuk industri pada periode (1984-1990) kemudian periode (1991-2000) tumbuh sangat cepat sebesar 160%. Bungkil kedelai merupakan komponen utama dalam industri pakan ternak setelah jagung, karena kandungan proteinnya yang tinggi. Struktur permintaan yang didominasi industri inilah mungkin yang mengakibatkan posisi pemerintah sampai sekarang terkesan tidak berpihak kepada petani.

Dalam perdagangan kedelai, pada Tabel 2 dapat dilihat, impor kedelai untuk bahan industri pada tahun 1995 lebih kecil (604 ribu ton) dibandingkan dengan impor konsumsi langsung (800 ribu ton). Namun untuk tahun-tahun berikutnya sampai 1999 pertumbuhan impor untuk bahan industri melonjak drastis. Mulai tahun 1997 walaupun pada saat itu nilai tukar rupiah terdepresiasi namun permintaan untuk bahan industri malah semakin tinggi dan turun pada tahun 2000 karena isu wabah penyakit peternakan yang bertubi-tubi (flu burung, antraks, kasus paha ayam dan lain-lain).

Pasokan kebutuhan kedelai dari dalam negeri semakin mengecil, hingga tahun 2004 hanya 35% (682.50 ribu ton) sedangkan impor mencapai 65% (1 267.50 ribu ton) dengan harga CIF US\$362.91/ton, dari total konsumsi sebesar 1 950 ribu ton (Dirjen Tanaman Pangan, 2005)

Tabel 3. Areal, Produksi, Produktivitas, Konsumsi dan Selisih Komoditas Kedelai di Indonesia 1998-2013.

Tahun	Areal (000 ha)	Produksi (000 ton)	Produktivitas (ton/ha)	Konsumsi (kg/kap/th)	Selisih
1998	1122	1275	1.136	7.00	-182
1999	1122	1275	1.137	6.95	-198
2000	1121	1274	1.137	6.94	-221
2001	1121	1274	1.137	6.93	-242
2002	1120	1274	1.137	6.93	-263
2003	1120	1274	1.138	6.92	-282
2004	1120	1274	1.138	6.91	-299
2005	1120	1274	1.138	6.90	-315
2006	1119	1274	1.138	6.89	-329
2007	1119	1275	1.139	6.88	-342
2008	1119	1275	1.139	6.87	-353
2009	1119	1275	1.139	6.86	-362
2010	1119	1276	1.140	6.84	-369
2011	1119	1276	1.140	6.83	-375
2012	1120	1277	1.141	6.82	-379
2013	1120	1278	1.141	6.81	-381
Pertumbuhan	-0.013	0.015	0.028	-0.18	5.087

Sumber: PSE Departemen Pertanian RI (2000).

Hasil studi proyeksi areal, produksi, produktivitas, konsumsi dan senjang komoditi oleh PSE Departemen Pertanian RI (2000), dalam kurun 16 tahun (1998-2013) seperti pada Tabel 3 diperoleh data sebagai berikut. Areal kedelai sedikit mengalami penurunan rata-rata -0.013% per tahun. Namun karena peningkatan produktivitas relatif lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan areal panen. Produksi diperkirakan masih meningkat rata-rata 0.015% per tahun. Tampaknya upaya peningkatan produksi kedelai ke depan sangat sulit jika tidak ada langkah-langkah terobosan yang diambil oleh pemerintah karena pertumbuhan produktivitas yang relatif rendah (0.028%).

Proyeksi konsumsi, sekalipun permintaan per kapita cenderung menurun, setelah tahun 2009 total permintaan kedelai terus meningkat mencapai sekitar 1.64 juta ton pada tahun 2010 dan 1.66 juta ton pada tahun 2013. Senjang antara produksi dan konsumsi yang selalu negatif artinya dalam neraca komoditi, Indonesia ke depan masih akan selalu mengalami kekurangan pasokan dari dalam negeri. Kekurangan tersebut dipenuhi dengan impor kedelai yang selalu akan mengalami peningkatan.

Dari aspek daya saing, menurut studi Siregar dan Sumaryanto (2003) daya saing kedelai telah menurun. Penurunan daya saing kedelai terutama karena kenaikan pemerintah tidak lagi berpihak kepada petani dalam menghadapi pasar yang sekarang semakin liberal. Daerah yang masih mempunyai keunggulan wilayah dalam penggunaan sumberdaya basis dengan nilai (LQ > 1) untuk pengembangan kedelai tinggal 6 propinsi dengan nilai masing-masing LQ sebagai berikut: Aceh (4.21), DIY (2.06), Jawa Timur (1.85), Bali (1.04), NTB (5.52) dan, Papua (1.17) (Hendayana. R., 2003).

3.3. Kebijakan Impor Kedelai

Untuk menstabilkan harga kedelai dalam negeri, pada awal tahun delapan puluhan BULOG melaksanakan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran kedelai. Karena intervensi BULOG dalam pengadaan kedelai impor, fluktuasi harga kedelai di dalam negeri lebih kecil dari fluktuasi harga kedelai internasional. Dalam periode 1972-1990, koefisien variasi harga kedelai di tingkat pedagang besar hanya 9%, sedangkan untuk harga kedelai internasional adalah 34% (Sudaryanto, et. al., 1992). Koefisien variasi harga kedelai riil domestik bahkan lebih kecil lagi yaitu 0.8% sementara untuk harga riil kedelai internasional adalah 5.3%. Selama berlakunya harga dasar kedelai (1981-1991) BULOG berhasil menstabilkan harga diperlihatkan oleh koefisien variasi harga produsen sebesar 32.1% dan koefisien variasi harga konsumen sebesar

38.7% menunjukkan harga konsumen kurang stabil jika dibandingkan dengan produsen tetapi masih lebih stabil jika dibandingkan dengan harga kedelai dunia dalam rupiah (Siregar, 2003). Ketidakstabilan harga kedelai dunia dalam rupiah disebabkan karena koefisien variansi kurs rupiah terhadap dolar cukup besar yaitu 40% (Sudaryanto *et. al.*, 2000).

Berkaitan dengan transmisi harga, Erwidodo dan Hadi (1999) kemudian dievaluasi Siregar (2003) memperoleh hasil regresi dengan elastisitas transmisi harga kedelai internasional terhadap harga kedelai pedagang besar adalah 0.7152 dan elastisitas transmisi harga kedelai pedagang besar terhadap harga kedelai produsen adalah 0.8774. Zulham dan Yumm (1996) menyatakan bahwa baik harga kedelai lokal maupun kedelai impor, pada tingkat pedagang besar relatif stabil dari bulan ke bulan, masing-masing dengan koefisien variasi 3.1% untuk kedelai lokal dan 3.0% untuk kedelai impor. Sementara itu nisbah harga kedelai lokal terhadap harga kedelai impor dari bulan ke bulan berada pada kisaran 0.9 % dan 1.0%.

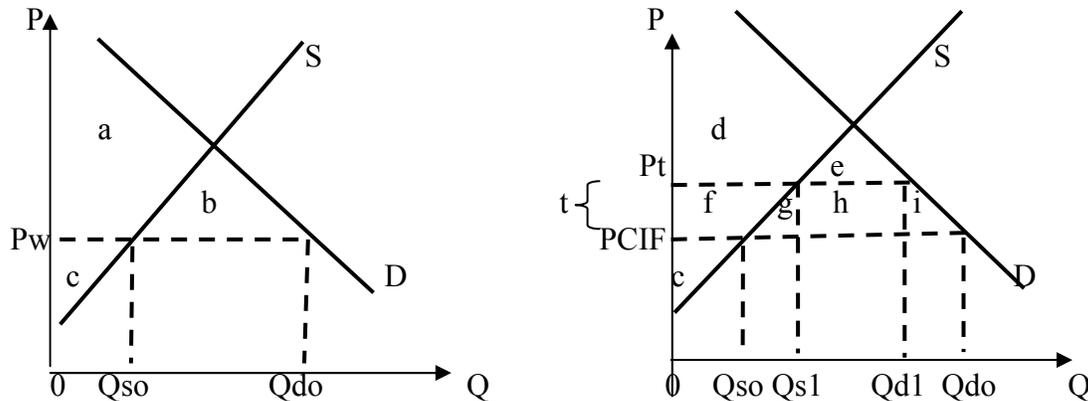
Kebijakan perdagangan internasional yang lain adalah pengenaan tarif *ad-valorem* untuk kedelai impor. Tarif tersebut dimulai sejak tahun 1974 sebesar 30% yang dipertahankan sampai tahun 1980. Sejak tahun 1981 sampai tahun 1993 tarif impor kedelai diturunkan menjadi 10% dan kemudian menjadi 5% pada tahun 1994 sampai tahun 1996. Pada tahun 1997 tarif tersebut diturunkan lagi menjadi 2.5% dan akhirnya tarif impor kedelai dihapuskan mulai tahun 1998 sampai sekarang. Kebijakan tersebut bersamaan dengan dihapuskannya monopoli BULOG sebagai importir tunggal kedelai mulai Januari 1998, kemudian impor kedelai boleh dilakukan oleh perusahaan swasta yang mampu.

IV. METODE ANALISIS DAN SIMULASI KEBIJAKAN

4.1. Metode Analisis

Untuk menganalisis dampak kebijakan pengenaan tarif impor kedelai terhadap kesejahteraan masyarakat digunakan metode analisis *Classical Welfare Analysis* (CWA) dengan pendekatan analisis penawaran dan permintaan pasar. Ilustrasi grafik disajikan pada Gambar 4. Pasar kedelai domestik terbentuk melalui interaksi antara kurva penawaran (S) dan kurva permintaan (D). Asumsinya adalah, Indonesia negara kecil dalam perdagangan kedelai dunia, maka jika tidak ada kebijakan proteksi apapun mengakibatkan harga kedelai dunia (PCIF = P_w) menjadi harga yang berlaku di pasar domestik (P_d). Pada tingkat harga P_w tersebut jumlah kedelai yang diminta sebesar $0Q_d$, yang dipenuhi oleh produksi domestik sebesar $0Q_s$, dan

impor sebesar $0Q_{do}-0Q_{so}$. Pada tingkat harga seperti ini, surplus konsumen dicerminkan oleh bidang (a + b), sementara itu surplus produsen sebesar bidang c.



Gambar 4. Analisis Komparatif Statik dari Dampak Pemberlakuan Tarif Impor Kedelai terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Kebijakan tarif diberlakukan sebesar $t\%$, maka harga kedelai domestik menjadi sebesar P_t ($PCIF + t$). Dampak dari kebijakan tersebut adalah kuantitas yang diminta akan turun menjadi $0Q_{d1}$, yang dipenuhi dari produksi domestik sebesar $0Q_{s1}$ (bertambah), dan impor sebesar $0Q_{d1}-0Q_{s1}$ (menurun). Dengan asumsi bahwa perbedaan harga tersebut merupakan refleksi dari pengenaan tarif, maka kenaikan harga ini akan menurunkan surplus konsumen sebesar bidang (f + g + h + i) dan meningkatkan surplus produsen sebesar bidang f. Penerimaan pemerintah yang diperoleh dari pengenaan tarif sebesar bidang h. Surplus konsumen dan surplus produsen tersebut mencerminkan kesejahteraan yang diperoleh konsumen dan produsen dari adanya perdagangan kedelai yang terjadi di pasar domestik.

Dari tarif, perubahan surplus konsumen yang terjadi yaitu sebesar $-(f + g + h + i)$, sebesar f ditransfer kepada produsen, dan sebesar h ditransfer kepada pemerintah. Sementara itu, g dan i hilang sebagai kerugian (inefisiensi masyarakat) dari kebijakan tarif yang diberlakukan (*deadweight losses*).

Dampak pengenaan tarif impor pada Gambar 4 di atas, secara operasional dihitung:

- (a) Dampak terhadap konsumen adalah konsumen harus mentransfer sebagian kesejahteraannya akibat pengenaan tarif impor (*consumer's loss*) sebesar bidang $-(f + g + h + i)$. *Consumer's loss* (CS) dihitung dengan persamaan:

$$CS = \{(Opt1 - OPCIF) \cdot OQ_{d1}\} + \{(Opt1 - OPCIF) \cdot (OQ_{d0} - OQ_{d1})/2\}$$

$$\text{dimana: } (OQ_{d0} - OQ_{d1}) = Ed \cdot t \cdot OQ_{d0} / OPCIF$$

$$(Opt1 - OPCIF) = t \cdot OPCIF$$

- (b) Dampak terhadap produsen adalah produsen menerima sebagian transfer dari konsumen sebesar f (*producer's gains*). *Producer's gains* (PS) dihitung:

$$PS = \{(Opt1 - OPCIF) * OQs0\} + \{(Opt1 - OPCIF) * (OQs1 - OQs0) / 2\}$$

dimana: $(OQs1 - OQs0) = Es * t * OQs1 / OPt$

- (c) Dampak terhadap penerimaan pemerintah (*government revenue*) adalah sebesar h . *Government revenue* (GR) dapat dihitung dengan rumus:

$$GR = (Opt1 - OPCIF) * (OQd1 - OQs1)$$

- (d) Dampak berupa inefisiensi akibat pengurangan konsumsi oleh konsumen (*consumer's dead weight loss*, CDWL) adalah sebesar i , dapat dihitung:

$$CDWL = - (Opt1 - OPCIF) * (OQd0 - OQd1) / 2$$

- (e) Dampak berupa inefisiensi akibat masuknya produsen yang tidak efisien (*producer's dead weight loss*, PDWL) adalah sebesar g , dapat dihitung:

$$PDWL = - (Opt1 - OPCIF) * (OQs1 - OQs0) / 2$$

4.2. Simulasi Kebijakan

4.2.1. Asumsi, Data dan Sumber Data.

Untuk melakukan penghitungan nilai parameter pada rumusan bagian 4.1. maka digunakan asumsi, data dan sumber data sebagai berikut:

1. Basis data yang digunakan adalah data tahun 2003 sampai dengan 2004 dengan asumsi selama periode waktu tersebut tidak terjadi perubahan teknologi maupun gejolak pasar yang berarti, dan variabel selain yang dispesifikasi dianggap tetap (*ceteris paribus*).
2. Harga impor kedelai digunakan harga CIF rata-rata bulan agustus sampai desember 2004 untuk kedelai segar dan olahan sebesar 362.91 US\$/ton. (Departemen Pertanian RI, 2004).
3. Tingkat nilai tukar valuta asing yang digunakan berdasarkan acuan angka Rp/US\$ yang digunakan dalam perhitungan APBN dan studi analisis long run dollar rasional terhadap rupiah tahun 2004 sampai 2020 pada kisaran Rp8 945.00/US\$ -Rp8 990.00/US\$ (Ratnawati et. al., 2004). Skenario simulasi ini ditetapkan Rp8 000.00/ US\$; Rp9 000.00/US\$, dan Rp9 500.00/US\$.
4. Basar tarif impor di skenariokan berdasarkan kebijakan baru tarif efektif, berlaku mulai pebruari 2005 sebesar 10%, dari bargaining pemerintah (10-15)%. Sedangkan Indonesia sudah mengikatkan tariff di AFTA dan WTO sebesar 27%. Sehingga dalam studi ini di tetapkan berturut-turut: 0%, 5%, 10%, 15%, dan 27%.

5. Harga kedelai pedagang besar diambil dari statistik harga pedagang besar beberapa propinsi di Indonesia (BPS, 2004) rata-rata Rp2 890.00/ kg.
6. Harga produsen kedelai diambil dari statistik harga produsen sektor pertanian di Indonesia (BPS, 2004) rata-rata Rp2 631.00/kg.
7. Jumlah penawaran kedelai digunakan data rata-rata bulan agustus sampai desember 2004 untuk kedelai sebesar 682.50 ribu ton. (Departemen Pertanian RI, 2004).
8. Jumlah impor kedelai digunakan data rata-rata impor bulanan bulan agustus sampai desember 2004 untuk kedelai segar dan olahan sebesar 1 267.50 ribu ton. (Departemen Pertanian RI, 2004).
9. Jumlah permintaan kedelai digunakan data rata-rata permintaan bulanan bulan agustus sampai desember 2004 untuk kedelai segar dan olahan sebesar 1 950.00 ribu ton. (Departemen Pertanian RI, 2004).
10. Elastisitas penawaran dan permintaan menggunakan angka dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Swastika (2000) dan dievaluasi oleh Siregar (2003) dengan elastisitas permintaan sebesar -0.3901 dan elastisitas penawaran kedelai sebesar 0.4032.
11. Elastisitas transmisi harga, menggunakan hasil penelitian Erwidodo dan Hadi (1999) kemudian dievaluasi Siregar (2003) yang memperoleh hasil regresi dengan elastisitas transmisi harga kedelai pedagang besar terhadap harga kedelai produsen adalah 0.8774 dan elastisitas transmisi harga kedelai internasional terhadap harga kedelai pedagang besar adalah 0.7152.

4.2.2. Metode Simulasi Kebijakan

Berdasarkan asumsi dan data di atas, maka untuk mengukur dampak kebijakan pengenaan tarif impor kedelai terhadap kesejahteraan masyarakat dilakukan secara simulasi dengan menggunakan data dasar seperti yang disajikan pada Tabel (4), sedangkan analisis simulasi kebijakan digunakan formula seperti tersaji pada Tabel (5).

Tabel 4. Data Dasar Evaluasi Kebijakan Pengenaan Tarif Kedelai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Uraian	Nilai
Jumlah produksi/penawaran pada tarif awal (ribu ton)	682.50
Jumlah impor pada tarif awal (ribu ton)	1 267.50

Uraian	Nilai
Jumlah Konsumsi/permintaan pada tarif awal (ribu ton)	1 950.00
Harga perdagangan besar tarif awal (Rp/Kg)	2 890.00
Harga produsen tarif awal (Rp/Kg)	2 631.00
Harga dunia kedelai impor (US \$/Ton)	362.91
Nilai tukar mata uang (Rp/US \$)	8 000, 9 000, 9 500
Nilai tingkat tarif impor (%)	0, 5, 10, 15, 27
Elastisitas Penawaran (Es)	0.40
Elastisitas Permintaan (Ed)	-0.39
Elastisitas transmisi harga perdagangan besar ke petani (Ep)	0.88
Elastisitas transmisi harga Internasional ke perdagangan besar (Et)	0.72

Tabel 5. Formula Analisis Dampak Kebijakan Tarif Impor Kedelai.

No.	Uraian	Simbol	Keterangan
1	Harga dunia (US\$/ton)	CIF	Data
2	Nilai tukar (Rp/US\$)	ER	Disimulasikan
3	Harga dunia (Rp/kg)	PCIF	CIF*ER
4	Tingkat tariff awal (%)	TR0	Disimulasikan
5	Tingkat tariff baru (%)	TR1	Disimulasikan
6	Tarif awal (Rp/kg)	T0	TR0*PCIF/100
7	Tarif baru (Rp/kg)	T1	TR1*PCIF/100
8	Perubahan tingkat tarif	dT	TR1-TR0
9	Harga perdagangan besar pada tariff awal (Rp/kg)	PWS0	Data
10	Harga produsen pada tariff awal (Rp/kg)	PF0	Data
11	Jumlah penawaran kedelai pada tariff awal (ribu ton)	Qs0	Data
12	Jumlah impor pada tariff awal (ribu ton)	Qm0	Data
13	Jumlah permintaan pada tariff awal (ribu ton)	Qd0	Qs0 + Qm0

No.	Uraian	Simbol	Keterangan
14	Elastisitas permintaan	Ed	Regresi (Swastika, Siregar, 2003)
15	Elastisitas penawaran	Es	Regresi (Swastika, Siregar, 2003)
16	Elastisitas transmisi harga perdagangan besar ke petani	Ep	Regresi (Erwidodo, Siregar, 2003)
17	<u>Efek Perubahan Tarif:</u>		
18	Elastisitas transmisi tarif ke harga perdagangan besar	Et	Regresi (Erwidodo, Siregar, 2003)
19	Efek pada harga perdagangan besar (%)	%dPWS	dT*Et
20	Perubahan pada harga perdagangan besar (Rp/kg)	dPWS	%dPWS*PWS0/100
21	Harga perdagangan besar pada tarif baru (Rp/kg)	PWS1	PWS0+dPWS
22	Efek pada harga produsen (%)	%dPF	%dPWS*Ep
23	Perubahan pada harga produsen (Rp/kg)	dPF	%dPF*PF0/100
24	Harga produsen pada tarif baru (Rp/kg)	PF1	PF0+dPF
25	Efek pada permintaan (%)	%dQd	%dPWS*Ed
26	Perubahan pada jumlah permintaan (ribu ton)	dQd	%dQd*Qd0/100
27	Jumlah permintaan pada tarif baru (ribu ton)	Qd1	Qd0+dQd
28	Efek pada penawaran (%)	%dQs	%dPF*Es
29	Perubahan pada jumlah penawaran (ribu ton)	dQs	%dQs*Qs0/100
30	Jumlah penawaran pada tarif baru (ribu ton)	Qs1	Qs0+dQs
31	Jumlah impor pada tarif baru (ribu ton)	Qm1	Qd1-Qs1
32	Perubahan pada jumlah impor (ribu ton)	dQm	Qm1-Qm0
33	Efek pada surplus konsumen (juta rupiah)	dCS	-{(dPWS*Qd1)+(dPWS*dQd/2)}
34	Efek pada surplus produsen (juta rupiah)	dPS	{(dPF*Qs0)+(dPF*dQs/2)}
35	Efek pada penerimaan pemerintah (juta rupiah)	dGR	Qm1*(T1-T0)
36	Efek bersih kesejahteraan sosial (juta rupiah)	dNS	dCS+dPS+dGR

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari data dasar berbagai sumber dan penelitian terdahulu, kemudian dilakukan analisis dampak kebijakan tarif impor kedelai. Pengolahan data dilakukan dengan perangkat lunak

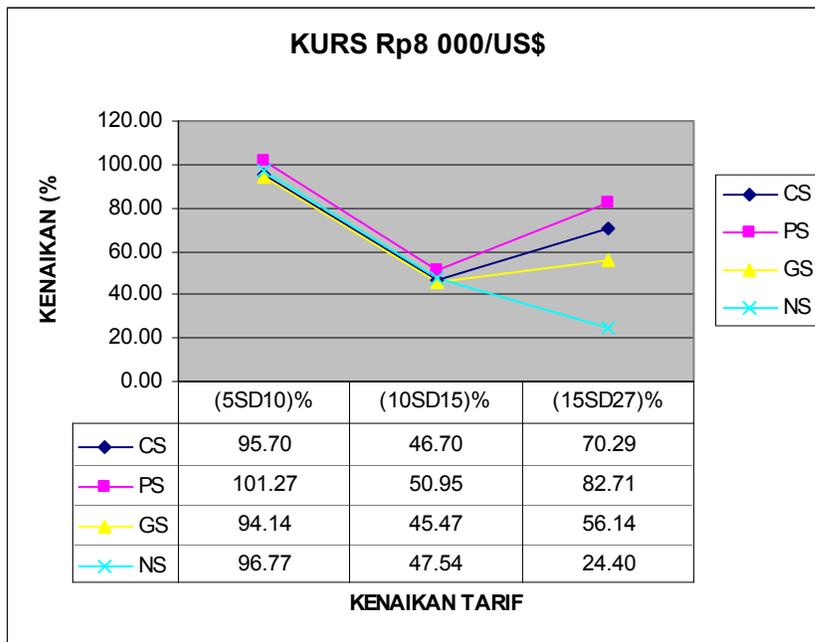
Microsoft Excel under Windows XP. Simulasi dampak kebijakan didasarkan pada (1) fenomena permasalahan munculnya pengenaan kembali tariff impor kedelai yang menjadi perdebatan di akhir tahun 2004, dan variabel eksogen (2) skenario pentarifan impor kedelai AFTA, serta (3) Analisis rasionalisasi nilai tukar rupiah jangka panjang 2020. Berdasarkan pertimbangan itu maka disusun 15 skenario analisis dampak kebijakan tarif impor kedelai di Indonesia yang ringkasannya disajikan pada Tabel 6, 7, dan 8 serta Grafik 4 sampai 8. Hitungan selengkapnya disajikan pada Lampiran 1 sampai 15. Pencaran analisis dikelompokkan menjadi dua jalur yaitu pendalaman dari sisi nilai tukar rupiah terhadap US\$ (Rp8 000.00 – Rp9 500.00)/US\$, dan besaran tariff (0 - 27)%.

Dengan pengenaan tarif impor kedelai, maka berdampak pada penurunan permintaan domestik, peningkatan produksi, serta insentif ekonomi yang dapat diterima oleh pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara agregat. Masing-masing dampak tersebut diuraikan pada bagian berikut.

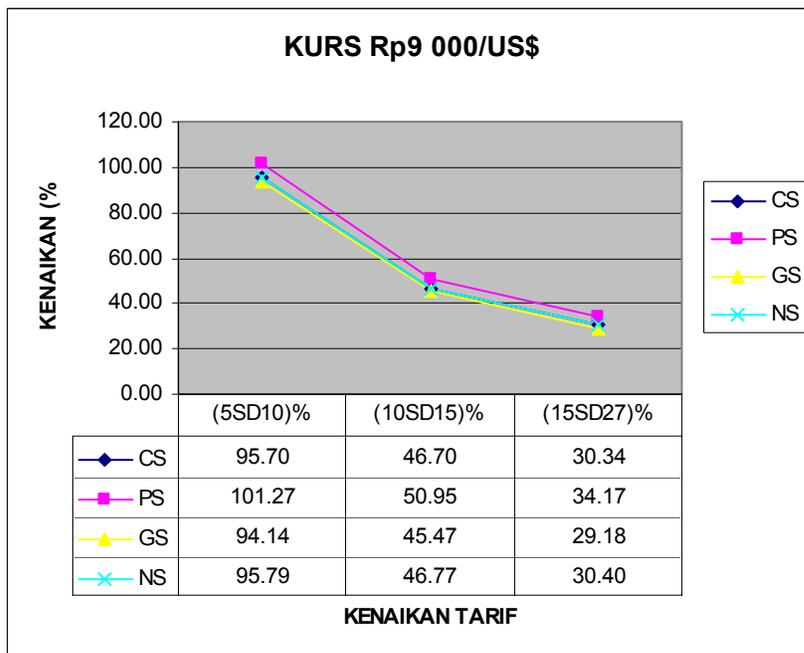
5.1. Skenario Pentarifan Impor Kedelai

Indonesia telah mengikatkan tarif impor kedelai dalam kesepakatan AFTA sebesar 27% efektif tahun 2010. AFTA memberi kebebasan sejak tahun 2004 untuk menerapkan tariff impor kedelai maksimal 5%. Pada bulan Pebruari 2005 Indonesia akan menerapkan tariff impor kedelai sebesar 10% (dari perdebatan antara 10 sampai 15%). Pemerintah berkeinginan akan menerapkan tariff 27% pada tahun 2007 pada saat perkiraan tercapainya swasembada kedelai dengan program BANGKIT KEDELAI yang dimulai tahun 2004. Waktu penetapan tersebut mendahului kesepakatan AFTA dan WTO (2010). Dari latar belakang historikal dan polemik tersebut, hasil analisis ini mencoba melakukan justifikasi. Pada Grafik 1, 2, dan 3 dapat dilihat bagaimana margin perubahan surplus konsumen (CS), surplus produsen (PS), penerimaan pemerintah (GS) dan efek kesejahteraan sosial (NS) pada berbagai besaran tarif.

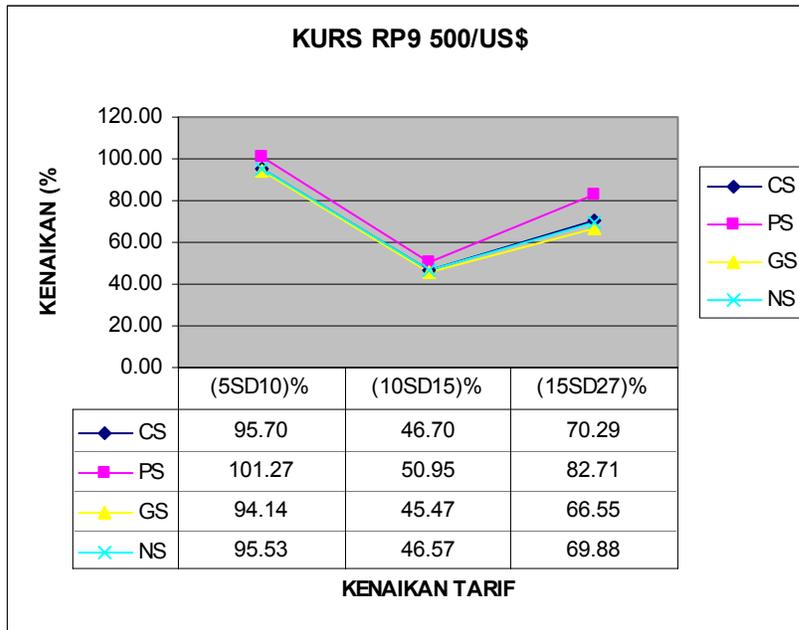
Pada tiga nilai tukar rupiah yang digunakan (Rp8 000; Rp9 000; dan Rp9 500) per US\$ menunjukkan pola sebagai berikut. Pada kenaikan tariff dari 5% ke 10% berdampak pada kenaikan margin surplus yang besar. Kenaikan tersebut utamanya pada surplus produsen (PS) rata-rata 101.27%, kemudian efek kesejahteraan sosial (NS) rata-rata 96.03%. Penurunan CS rata-rata 95.70% yang lebih kecil dibandingkan dengan PS. Sedangkan GS naik rata-rata 94.14%.



Grafik 1. Dampak Besar Tarif Terhadap Margin Perubahan Surplus Pada Kurs Rp8 000/US\$



Grafik 2. Dampak Besar Tarif Terhadap Margin Perubahan Surplus Pada Kurs Rp9 000/US\$



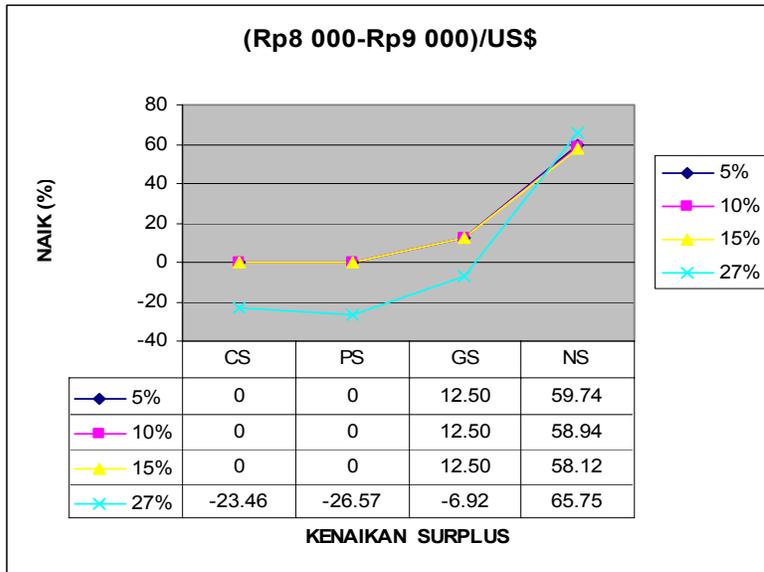
Grafik3. Dampak Besar Tarif Terhadap Margin Perubahan Surplus Pada Kurs Rp9 500/US\$

Pada kenaikan tariff 10% ke 15% terjadi penurunan dampak untuk semua surplus. Sedangkan pada kenaikan tariff 15% ke 27% mengalami kenaikan surplus kembali kecuali NS pada kurs Rp8 000/US\$ (Grafik 1) dan untuk semua surplus (pada kurs Rp9 000/US\$ (Grafik 2) mengalami penurunan. Pada kurs Rp9 500/US\$ semua besaran tariff sampai 27% meningkatkan dampak surplus berkisar antara 66.55%-82.71% namun pada tariff 10% dampak kenaikan tariffnya masih lebih besar berkisar 94.14%-101.27%. Hasil ini mengindikasikan bahwa pada keseimbangan perdagangan yang ada sekarang dengan menetapkan tariff sebesar 10% merupakan kondisi besaran tariff yang paling baik. Peningkatan tariff sampai 27% masih dapat dimungkinkan khususnya pada saat rupiah terdepresiasi sampai Rp9 500/US\$ dari kondisi sekarang, ceteris paribus.

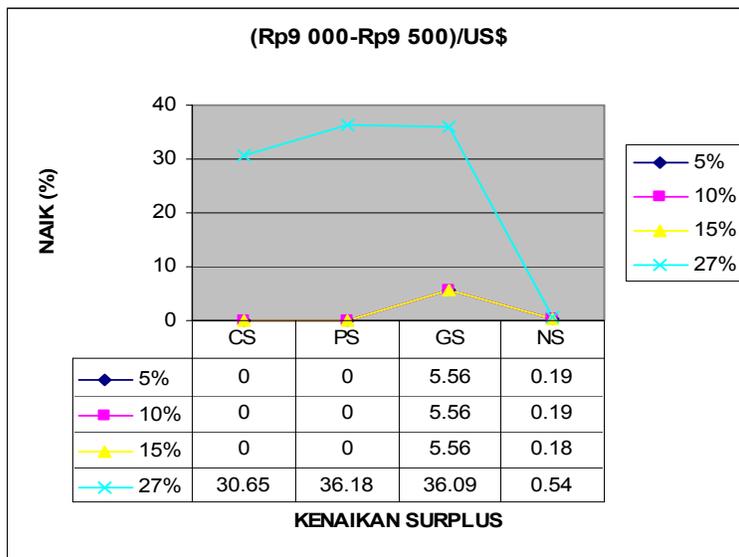
5.2. Skenario Nilai Tukar Rupiah

Berdasarkan pada Bagian 4.2.1. angka 3 maka skenario simulasi kebijakan digunakan nilai nilai tukar Rp8 000.00/ US\$; Rp9 000.00/US\$, dan Rp9 500.00/US\$. Pada Grafik 4 dan 5 terlihat bahwa dengan perubahan berbagai tingkat nilai tukar rupiah tidak menunjukkan dampak perubahan pada (CS) dan (PS). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sudaryanto *et al.*, (2000) bahwa harga dalam negeri tidak dipengaruhi oleh tarif. Kemudian temuan studi Zulham dan

Yumm, (1996) dari nisbah harga produsen dan konsumen kedelai tidak berfluktuasi besar baik untuk antar daerah di Indonesia (0.8 dan 0.9) dan antar waktu (0.9 dan 1.0).



Grafik 4. Dampak Kenaikan Kurs Terhadap Margin Perubahan Pada Surplus



Grafik 5. Dampak Kenaikan Kurs Terhadap Margin Perubahan Pada Surplus.

Tabel 6. Dampak Pengenaan Tarif Impor Kedelai pada Nilai Tukar Rp8 000.00/US\$

No	Indikator Kesejahteraan	Tingkat Pengenaan Tarif (%)				
		0	5	10	15	27
1	Surplus Konsumen	0	-198 604.29	-388 661.18	-570 170.64	-970 919.93

	(juta Rp)					
2	Surplus Produsen (juta Rp)	0	57 249.75	115 226.12	173 929.13	317 781.01
3	Penerimaan Pemerintah (juta Rp)	0	178 754.54	347 027.40	504 818.60	788 205.26
4	Efek Kesejahteraan Sosial (juta Rp)	0	37 399.99	73 592.35	108 577.09	135 066.35

Sumber: Analisis Simulasi Kebijakan Tarif Impor Kedelai

Kemudian Siregar dan Sumaryanto (2003) dalam studinya menemukan bahwa petani menerima harga kedelai masih dibawah/lebih rendah dari harga bayangannya. Siregar (2003) juga menemukan bahwa fluktuasi harga kedelai di dalam negeri lebih kecil dibandingkan dengan harga kedelai internasional. Dengan demikian paritas harga domestik tidak berpengaruh pada permintaan dan penawaran kedelai Indonesia, namun kuantitas kedelai yang mempengaruhi permintaan dan penawaran kedelai. Hal itu sejalan dengan penelitian Erwidodo (1999) dan Swastika *et al.*, (2000).

Tabel 7. Dampak Pengenaan Tarif Impor Kedelai pada Nilai Tukar Rp9 000.00/US\$

No	Indikator Kesejahteraan	Tingkat Pengenaan Tarif (%)				
		0	5	10	15	27
1	Surplus Konsumen (juta Rp)	0	-198 604.29	-388 661.18	-570 170.64	-743 132.70
2	Surplus Produsen (juta Rp)	0	57 249.75	115 226.12	173 929.13	233 358.77
3	Penerimaan Pemerintah (juta Rp)	0	201 098.85	390 405.83	567 920.93	733 644.15
4	Efek Kesejahteraan Sosial (juta Rp)	0	59 744.30	116 970.78	171 679.42	223 870.23

Sumber: Analisis Simulasi Kebijakan Tarif Impor Kedelai.

Tabel 8. Dampak Pengenaan Tarif Impor Kedelai pada Nilai Tukar Rp9 500.00/US\$

No	Indikator Kesejahteraan	Tingkat Pengenaan Tarif (%)				
		0	5	10	15	27
1	Surplus Konsumen	0	-198 604.29	-388 661.18	-570 170.64	-970 919.93

	(juta Rp)					
2	Surplus Produsen (juta Rp)	0	57 249.75	115 226.12	173 929.13	317 781.01
3	Penerimaan Pemerintah (juta Rp)	0	212 271.01	412 095.04	599 472.09	998 393.33
4	Efek Kesejahteraan Sosial (juta Rp)	0	70 916.46	138 659.99	203 230.58	345 254.42

Sumber: Analisis Simulasi Kebijakan Tarif Impor Kedelai.

Perubahan nilai tukar rupiah berpengaruh pada perubahan pada GS utamanya pada nilai tukar Rp8 000/US\$ menjadi Rp9 000/US\$ khususnya untuk tarif 10% dan 27%. Dengan rata-rata 2.79%. Hal itu juga terjadi pada NS yang mengalami kenaikan konsisten 60.64% (lihat Grafik 4). Dengan demikian pada kondisi perdagangan sekarang penetapan tarif 10% masih baik, dan kenaikan besar tarif sampai 27% masih dimungkinkan karena masih berdampak pada kenaikan semua surplus dan perbaikan kesejahteraan masyarakat, *citereis paribus*.

Dari analisis tren margin tersebut selanjutnya analisis simulai kebijakan pengenaan tarif difokuskan pada tarif 10% dan 27% dengan nilai tukar Rp9 000/US\$.

5.3. Perubahan Surplus Konsumen

Pada nilai tukar Rp9 000.000/US\$ dengan pengenaan tarif impor kedelai sebesar 10% akan menurunkan surplus konsumen sebesar Rp 388.7 milyar. Pada peningkatan tarif menjadi 27% penurunan surplus konsumen bertambah menjadi Rp743.1 milyar. Namun secara keseluruhan baik surplus produsen, penerimaan pemerintah dan efek kesejahteraan sosial mengalami kenaikan yang lebih besar porsinya.

5.4. Perubahan Surplus Produsen

Secara umum, pengenaan tarif impor kedelai berdampak pada perbaikan produsen pada berbagai skenario kebijakan. Pada nilai tukar Rp9 000.000/US\$ dengan pengenaan tarif impor kedelai sebesar 10% menaikkan surplus produsen sebesar Rp115.3 milyar. Bila tarif ditingkatkan menjadi 27% akan meningkatkan surplus produsen menjadi Rp233.4 milyar. Ini berarti bahwa kenaikan besaran tarif impor masih akan memberikan insentif bagi petani untuk meningkatkan produksinya, *citeris paribus*.

5.5. Perubahan Penerimaan Pemerintah

Perubahan penerimaan pemerintah dengan pengenaan tarif impor sebesar 10% pada nilai tukar Rp9 000/US\$ porsinya paling besar yaitu Rp390.4 milyar. Kenaikan perubahan penerimaan pemerintah masih terjadi pada peningkatan tarif impor sampai 27% sebesar Rp733.6 milyar. Maknanya adalah bahwa pengenaan kebijakan tari kedelai akan memberi dampak insentif yang menguntungkan bagi pemerintah. Atas insentif pemerintah tersebut dapat dapat digunakan kembali bagi perbaikan/peningkatan produksi domestic melalui kebijakan fiskal maupun moneter.

5.6. Efek Kesejahteraan Sosial

Secara keseluruhan, pengenaan tariff impor kedelai dari semua simulasi kebijakan perbaikan efek kesejahteraan sosial dan semakin meningkat pada setiap peningkatan tariff dan perubahan nilai tukar rupiah. Pada nilai tukar Rp9 000.000/US\$ dengan pengenaan tarif impor kedelai sebesar 10% akan meningkatkan efek kesejahteraan social sebesar Rp117.0 milyar. Peningkatan besar tariff sampai 27% masih akan meningkatkan efek kesejahteraan social keseluruhan sebesar Rp223.9 milyar, *ceteris paribus*. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan besar tarif impor kedelai, sampai batas tertentu masih berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

VI. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

6.1. Kesimpulan

Dari tinjauan teoritis, penelitian terdahulu dan analisis data maka kesimpulan dari studi ini adalah:

1. Pertumbuhan produksi, luas areal, dan produktivitas kedelai dunia periode 1990-2010 masing-masing 3.6%; 1.9%; dan 1.7% per tahun. *Net balance* tumbuh +50%. Hal tersebut mengindikasikan bahawa pasar kedelai dunia memiliki potensial stok yang baik sehingga ekspansi pasar, utamanya untuk negara pengimpor seperti Indonesia sangat memungkinkan.
2. Kondisi produksi, konsumsi, impor dan pasar domestik kedelai Indonesia adalah:
 - a. Pertumbuhan produksi, luas areal, dan produktivitas kedelai domestik periode (1984-2000) masing-masing -5.83%; -5.72%; dan -0.05% per tahun. Konsumsi untuk biji, olahan, dan bahan industri masing-masing tumbuh 0.5%; 24.5%; 10% per tahun. Sedangkan proyeksi pertumbuhan luas areal, produksi, produktivitas, konsumsi, dan konsumsi per kapita rata-rata -0.013%; 0.015%; 0.028%; 1.22%, dan -0.18%.

- b. Impor kedelai pada tahun tahun 2004 mencapai 65% dari total permintaan kedelai domestik. Nisbah harga kedelai lokal terhadap impor (0.9-1.0)%, dengan fluktuasi harga kedelai dalam negeri lebih kecil dibandingkan dengan harga dunia, fluktuasi harga petani lebih kecil dibandingkan dengan pedagang besar, dan fluktuasi harga konsumen juga lebih kecil dibandingkan dengan pedagang besar. Elastisitas transmisi harga internasional ke pedagang besar (0.7152), pedagang besar ke petani (0.8774). Elastisitas permintaan - 0.3901 dan elastisitas penawaran (0.4032).
 - c. Daya saing kedelai menurun utamanya sejak tahun 1998, dengan daerah produksi utama (yang masih memiliki daya saing) adalah: DIY, Aceh, Jawa Timur, Bali, NTB, dan Papua.
3. Pada semua nilai tukar yang disimulasikan, pada kenaikan tarif dari 5% ke 10% berdampak pada kenaikan margin surplus yang besar, *ceteris paribus*. Kenaikan tersebut utamanya pada surplus produsen (PS) rata-rata 101.27%, kemudian efek kesejahteraan sosial (NS) rata-rata 96.03%. Penurunan CS rata-rata 95.70% yang lebih kecil dibandingkan dengan PS. Sedangkan GS naik rata-rata 94.14%. Sehingga penetapan tariff impor kedelai yang akan dimulai bulan pebruari 2005 adalah pilihan besaran tariff yang baik.
 4. Kenaikan besar tarif sampai dengan 27% masih dimungkinkan utama jika rupiah terdepresiasi sampai dengan Rp9 500/US\$. Dengan besaran tarif mpor kedelai pada keseimbangan perdagangan sekarang layak pada kisaran nilai (10-27)%, *ceteris paribus*.
 5. Perubahan nilai tukar rupiah berpengaruh pada perubahan pada GS utamanya pada nilai tukar Rp8 000/US\$ menjadi Rp9 000/US\$ khususnya untuk tarif 10% dan 27%. Dengan rata-rata margin perubahan 2.79%. Sehingga analisis kebijakan pada studi ini difokuskan pada nilai tukar rupiah Rp9 000/US\$ dengan besar tarif impor 10% dan peningkatan tarif sampai 27%.
 6. Dengan acuan nilai tukar rasional Rp9 000/US\$ dan kebijakan pengenaan tarif layak sebesar 10% seperti ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku mulai bulan pebruari 2005 akan berdampak kepada (*ceteris paribus*):
 - a. Menurunkan surplus konsumen sebesar Rp 388.7 milyar. Pada peningkatan tarif menjadi 27% penurunan surplus konsumen bertambah menjadi Rp743.1 milyar.
 - b. Menaikkan surplus produsen sebesar Rp115.3 milyar. Bila tarif ditingkatkan menjadi 27% akan meningkatkan surplus produsen menjadi Rp233.4 milyar.
 - c. Menaikkan penerimaan pemerintah Rp390.4 milyar. Kenaikan perubahan penerimaan pemerintah masih terjadi pada peningkatan tarif impor sampai 27% sebesar Rp733.6 milyar.

- d. Meningkatkan efek kesejahteraan sosial sebesar Rp117.0 milyar. Peningkatan besar tarif sampai 27% masih akan meningkatkan efek kesejahteraan social keseluruhan sebesar Rp223.9 milyar.

6.2. Implikasi Kebijakan

Dari kesimpulan studi ini, implikasi kebijakan yang disarankan adalah:

1. Langkah pemerintah untuk menetapkan tariff impor kedelai sebesar 10% mulai bulan pebruari 2005 adalah keputusan kebijakan yang baik karena dampak perbaikan surplus produsen, penerimaan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat lebih besar dibandingkan dengan penurunan surplus konsumen.
2. Peningkatan besar tariff sampai dengan 27% masih disarankan, khususnya jika rupiah terdepresiasi sampai Rp9 500/US\$. Namun demikian tetap memperhatikan resiko penurunan keuntungan normal dari petani kedelai dan trade off lahan kedelai untuk pengembangan tanaman pangan lainnya.
3. Kebijakan pengenaan tarif impor kedelai adalah bagian dari upaya untuk mendorong produksi domestik. Bagian penting lainnya yang perlu disampaikan disini adalah upaya dorongan produksi kedelai domestik pada tingkat usahatani, khususnya dengan pengembangan teknologi benih yang familier dengan agroklimat Indonesia yang variabilitasnya sangat besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Amang .B., Sawit. H., Rachman. A., 1996. *Ekonomi Kedelai Di Indonesia*, IPB Press. Bogor.
- Alexandrates, N., 1995. *World Agriculture: Towards 2010*, FAO and John Wiley and Sons, New York.
- Bisnis Indonesia, 2004. 65% Kebutuhan Kedelai Nasional Masih Diimpor, *BI*, 17 Desember, Jakarta.
- Bisnis Indonesia, 2005. Harga Kedelai Terus Merambat Naik, *BI*, 5 Januari, Jakarta.
- Daryanto, A. Bahan Kuliah Dasar-Dasar Ekonomi Sumberdaya, Jurusan Sosek, Fakultas Pertanian, IPB, Bogor.
- Darsono, 2004. *Ekonomi Jambu Mete*, Pustaka Caraka dan LPM UNS, Surakarta.
- Dirjen Tanaman Pangan, 2005. *Data Produksi dan Perdagangan Kedelai Indonesia*, Departemen Pertanian RI, Jakarta.

- Hayami, Y., T. Kawagoe, Y. Morooka, and Siregar, M., 1987. *Agricultural Marketing and Processing in Upland Java: A Perspektive from A Sunda Village*, CGPRT No.8 The CGPRT Centre, Bogor.
- Handayana. R., 2003. *Price and Investment Policies in the Indonesian Food Crop Sector*, CASER, Bogor.
- Hafsyah. J. 2004. *Gerakan Bangkit Kedelai*, Dirjen Tanaman Pangan, Deptan RI, Jakarta.
- Just, R.E., Hueth, D., Schmitz, A., 1982. *Applied Welfare Economics and Public Policy*, Prentice-Hall, Inc. New Jersey.
- Pindyck, R.S., and Rubinfeld, D.L., 1992. *Microeconomics, 4th edition*, Dalam Edisi Bahasa Indonesia, PT Prenhallindo, Jakarta.
- PSE, 2000. *Analisis Produk dan Konsumsi Kedelai Indonesia*, PSE Balitbang Pertanian, Deptan RI, Bogor.
- Myles, G.D., 1995. *Public Economics*, Cambridge University Press, New York.
- Purwanto, A. Dan A. Suryana, 1997. *Keunggulan Komparatif dan Struktur Proteksi Produk Tanaman Pangan dan Peternakan*, Puslit Pangan Bogor.
- Purwanto, A. Dan B. Sayaka, 1992. *Ekonomi Kedelai di Sulawesi Selatan*, Puslit Pangan Bogor.
- Rachman, A., Prasta, Y., Purnomo, S., Indarini, 1983. *Analisa Kebijakan Pangan: Antara Tujuan dan Kendala*, BULOG, Jakarta.
- Rachman, A., Rusastra, I. W., Supanto, A., 1996. Kedelai Dalam Kebijakan Pangan Nasional, dalam Amang .B., Sawit. H., Rachman. A., *Ekonomi Kedelai Di Indonesia*, IPB Press. Bogor.
- Rosegrant, M.V, F. Kasryno, L.A. Gonzales, C.A. Rasahan and Y. Saefudin, 1987. *Price and Investment in the Indonesian Food Crop Sector*. International Food Policy Research Institute, Washington D.C, and Center for Agro Economic Research, Bogor.
- Ratnawati. A., Siregar. H., Harianto., 2004. *Analisis longrun Nilai Dollar Rasional*, Ssosek, Fak. Pertanian, IPB, Bogor.
- Swastika. D.K.S., Adnyana. M.O., Ilham. N., Kustiarti. R., Winarso. B., Soeprapto, 2000. *Analisis Penawaran dan Permintaan Komoditas Pertanian Utama di Indonesia*, PSE Balitbang Pertanian, Deptan RI, Bogor.
- Sinar Tani, 2004. Rp2 trilyun Devisa Hilang Akibat Impor Kedelai, Sintan, 4Juli, Jakarta.
- Siregar, M., 1999. "Metode Alternatif Penentuan Tingkat Hasil dan Harga Kompetitif: Kasus Kedelai", *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, PSE Balitbang Pertanian, Deptan RI, Bogor. Vol.17(1):66-73.

- Siregar, M., 2003. *Kebijakan Perdagangan dan Daya saing Komoditas Kedelai*, PSE Balitbang Pertanian, Deptan RI, Bogor.
- Sudaryanto, T., Rusasatra, I.W. dan Saptana, 2001. “Perspektif Pengembangan Ekonomi Kedelai di Indonesia”, *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, PSE Balitbang Pertanian, Deptan RI, Bogor. Vol.19(1):1-20.
- Siregar, M., dan Sumaryanto, 2003. “Analisis Daya Saing Usahatani Kedelai di DAS Brantas,” *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, PSE Balitbang Pertanian, Deptan RI, Bogor. Vol.21(1):50-71.
- Zulham dan Yumm, 1996. Pemasaran dan Pembentukan Harga, dalam Amang .B., Sawit. H., Rachman. A., *Ekonomi Kedelai Di Indonesia*, IPB Press. Bogor.